

## **ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI MADRASAH**

**MONIKA SARI AROFAH, ABDUL AZIS, AGUS ZAENUL FITRI**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Email: monika08mgmail.com, azisabdul@gmail.com, azaenulfitri@gmail.com

### ***Abstract: Analisis of Indpendent Curriculum Implementation Policy in Madrasah***

*This independent curriculum (kurikulum merdeka) has been designed to strengthen the profile of Pancasila students consists of six elements: faith, fear of God Almighty, and noble character; global diversity; cooperation; independence; critical reasoning; and creativity. This research aims to analyze the implementation of indepedence curriculum carried out by madrasas through the decree of the Ministry of Religious Affair (KMA) Number 347 of 2022. The approach used by researchers is a library research with content analysis method. In this research primary data source such as books, journals, newspapers, and other documents. The results of this research conclude that implementation of independent curriculum (kurikulum merdeka) in madrasas required learning facilities and infrastructure. In addition, educators are needed to understand the curriculum, such as learning achievements (CP), learning objectives (TP), and learning objectives flow (ATP). Beside it, the teacher must be able to integrate the material learning with orientation to strengthen profile of Pancasila students rahmatan lil alamin (P5 PPRA). This qualitative research ultimately has limitations considering that the results of this study do not reflect the implementation of independent curriculum in specific madrasa. Therefore, it is necessary to conduct more comprehensive research with field research.*

***Keywords:*** *Analyze, Indepence Curriculum, Madrasah*

### **Abstrak: Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah**

Kurikulum Merdeka dirancang sedemikian rupa memperkuat profil siswa Pancasila terdiri dari enam unsur yaitu iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, keragaman global, kerjasama, kemerdekaan, penalaran kritis, dan kreativitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kurikulum kemandirian yang dilakukan oleh madrasah melalui Keputusan Kementerian Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah perpustakaan penelitian dengan metode analisis isi. Dalam penelitian ini data primer sumber seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini memerlukan fasilitas pembelajaran dan infrastruktur. Selain itu, pendidik juga diperlukan untuk memahami hal tersebut kurikulum, seperti prestas belajar (CP), tujuan pembelajaran (TP), dan alur tujuan pembelajaran (ATP). Selain itu, guru juga harus mampu memadukan materi pembelajaran dengan orientasi penguatan profil sekolah Pancasila rahmatanlil

alamin (P5 PPRA). Hasil penelitian ini tidak mencerminkan, pelaksanaan independent kurikulum di madrasah tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan penelitian lapangan.

**Kata Kunci:** Analisis, Kurikulum Merdeka, Madrasah

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam upaya menjaga keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sebagai sebuah sistem selalu mengikuti dinamika perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Pasca pandemi Covid-19, sistem pendidikan di Indonesia membutuhkan langkah-langkah penyesuaian dalam upaya pemulihan pembelajaran akibat ketidakstabilan yang ditimbulkan dari wabah penyakit menular tersebut (Prasetia *et al.*, 2021). Pembelajaran tatap muka yang sudah menjadi ciri utama sistem pendidikan nasional secara tiba-tiba harus beralih ke sistem pembelajaran jarak jauh melalui perangkat teknologi informasi. Tak pelak hal ini menimbulkan chaos yang berdampak pada ketidakseimbangan sistem pendidikan yang dijalankan (Churiyah *et al.*, 2020)

Tujuan pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan segala problematika yang ditimbulkan. Tenaga pendidik yang cenderung belum familiar dengan perangkat teknologi pembelajaran harus tertatih-tatih menggunakannya sebagai alat bantu pembelajaran yang beralih ke sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) (Baidhawiy, 2007). Keadaan demikian berdampak pada menurunnya moralitas pembelajar. Melansir temuan penelitian Asmuni, pembelajaran dalam jaringan (daring) kerap menimbulkan banyak persoalan. Alih-alih belajar dengan sungguh-sungguh, sebagian siswa justru lebih banyak menghabiskan waktu bermain game dan menonton video lewat smartphone yang seharusnya diperuntukkan untuk belajar (Nuwa, 2020). Selain itu, derasnya informasi yang tak terbendung semakin memudahkan mereka dalam mengakses informasi yang tidak semestinya mereka konsumsi. Sehingga membutuhkan kerjasama yang lebih intens antara sekolah, guru, dan orang tua agar pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan (Fitriyah & Wardani, 2022).

Dalam rangka penyesuaian pembelajaran pascapandemi Covid-19 ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan penerapan kurikulum merdeka yang menggantikan kurikulum 2013. Dalam praktiknya, implementasi kurikulum ini dilakukan secara bertahap melalui skema sekolah penggerak yang mulai diterapkan di sekolah-sekolah yang memiliki kesiapan secara fasilitas, maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Melansir laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kurikulum merdeka mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2021/2022 di sekitar 2.500 sekolah mulai dari tingkat TK-B, SD, SMP, dan SMA di mana pada jenjang SD diterapkan di kelas I dan IV,

jenjang SMP di kelas VII, dan jenjang SMA di kelas X.5 Penerapan ini mengacu pada Permendikbudristek No. 5, No. 7, dan No. 262/M Tahun 2022

Implementasi kurikulum merdeka juga berlaku di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 347 Tahun 2022, Direktorat Pendidikan Islam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan jenjang RA, MI, MTs, dan MA/MAK. Pada tahun 2022 ditetapkan 2.471 lembaga madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka. Sejumlah madrasah ini dipilih sebagai madrasah percontohan (piloting) implementasi kurikulum merdeka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3811 Tahun 2022 tentang Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023. Pada tahun pelajaran 2023/2024 implementasi kurikulum merdeka ini direncanakan menjangkau lebih banyak lagi madrasah. Menurut Moh Isom selaku Direktur KSKK Madrasah ada 26.169 madrasah negeri dan swasta mulai dari tingkat RA, MI, MTs, dan MA/MAK akan menerapkan kurikulum merdeka. Kebijakan ini akan menjangkau lebih banyak madrasah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah memerlukan analisis lebih lanjut guna mengetahui gambaran kebijakan implementasi kurikulum merdeka tersebut (Zulaiha *et al.*, 2023). Sehingga diharapkan kajian ini dapat membantu guru dalam mempersiapkan diri menyambut implementasi kurikulum merdeka secara menyeluruh pada tahun 2024. Sebab, guru sebagai pihak terdepan yang bersentuhan langsung dengan kurikulum diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, maupun kecakapan dalam melaksanakan pembelajaran perspektif kurikulum merdeka yang lebih menekankan fleksibilitas pembelajaran yang terintegrasi dan berorientasi pada penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil Alamīn. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar pada madrasah (Direktorat KSKK, 2022).

Sejak diberlakukannya kurikulum merdeka pada tahun 2022, sejauh penelusuran peneliti, beberapa peneliti telah melakukan kajian mengenai implementasi kurikulum merdeka. Pertama, penelitian kualitatif oleh Mushtofa tentang implementasi kurikulum merdeka di madrasah aliyah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan penerapan kurikulum merdeka di madrasah memiliki tantangan bagi guru. Maka dari itu diperlukan pelatihan-pelatihan yang melibatkan guru agar lebih adaptif terhadap kurikulum baru yang digunakan.<sup>7</sup> Kedua, penelitian Zainuri tentang implementasi kurikulum merdeka di madrasah ibtidaiyah. Penelitian yang dilakukan di MIN 1 Palembang tersebut menyimpulkan pembelajaran kurikulum merdeka bermuara pada karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar pancasila, yakni berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif.

Selanjutnya, temuan penelitian menggarisbawahi bahwa guru perlu mempelajari lebih dalam mengenai capaian pembelajaran dalam setiap fase pada kurikulum merdeka.

Kemudian (Anas *et al.*, 2023) melakukan penelitian Pustaka dengan fokus analisis implementasi kurikulum merdeka pada madrasah ibtidaiyah. Penelitian pustaka tersebut memberikan rekomendasi implementasi kurikulum merdeka pada madrasah ibtidaiyah dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa yang mengacu pada KMA No. 347 tahun 2022.10 Kemudian (Aisyah *et al.*, 2023) dalam kajiannya mengatakan bahwa dalam menyambut kurikulum merdeka, madrasah hendaknya melakukan inovasi, khususnya pada pembelajaran dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang diuraikan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Secara spesifik riset ini mengkaji obyek berbeda yang belum dikaji. Jika pada pustaka terdahulu lebih terfokus pada implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan tertentu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis kebijakan mengenai implementasi kurikulum merdeka di madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama berdasarkan KMA No. 347 Tahun 2022. Dengan pendekatan pustaka, penelitian ini dirasa penting dilakukan guna memperoleh gambaran penerapan kebijakan tersebut. Sehingga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi madrasah-madrasah yang hendak menerapkan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2023/2024.

## **METODE PENELITIAN**

Penyusunan karya tulis ini, penulis menggunakan metode analisis kepustakaan yaitu dengan memanfaatkan sumber perpustakaan, buku, artikel, jurnal, berita, serta dokumen pendukung lainnya untuk memperoleh teori-teori yang berkenaan dengan kebijakan implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Penyusunan karya tulis ini didasarkan pada sumber-sumber ilmiah yang kemudianditulis secara sistematis sesuai kaidah penulisan karya tulis ilmiah, yang dalam hal ini adalah artikel atau jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu komponen paling penting dan krusial dalam sistem pendidikan adalah kurikulum yang merupakan seperangkat sistem yang memuat materi pembelajaran yang hendak diajarkan kepada peserta didik. Dalam pelaksanaannya, kurikulum memerlukan desain strategi yang tepat untuk mengimplementasikannya. Menurut (Asmuni, 2020), desain kurikulum ini dapat menggunakan pendekatan yang lebih instrumental yang menawarkan tiga perspektif, yakni kurikulum sebagai pengalaman didefinisikan sebagai satu set pengalaman belajar yang direncanakan oleh guru; kurikulum sebagai rencana yang ditandai dengan tujuan yang ditetapkan; dan kurikulum sebagai suatu proses menekankan pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri peserta didik melalui pengalaman belajar. Dalam pendekatan kurikulum yang ketiga tersebut. menekankan pada aktualisasi diri siswa melalui pengalaman belajar di

sekolah sehingga dapat membentuk pribadi yang baik. Kurikulum merupakan fakta sosial yang tidak hanya mencakup aktivitas pembelajaran antara guru dan siswa semata, tetapi lebih jauh dari itu kurikulum mencakup secara menyeluruh semua stakeholder yang terlibat di dalamnya, mulai dari pemerintah sebagai perancang dan pembuat kurikulum sampai pada masyarakat di akar rumput yang turut serta berpartisipasi dalam pendidikan guna mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan (Giatman *et al.*, 2020).

### **Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan**

Pasca pandemi Covid-19 yang merubah hampir seluruh tatanan kehidupan secara global, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka yang dilaksanakan secara berangsur sejak tahun 2022. Peralihan kurikulum ini ditandai dengan diberlakukannya sejumlah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, seperti Permendikbud Ristek No. 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi kelulusan yang mengatur standar kompetensi lulusan pada pendidikan dasar dan menengah dengan minimal memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap; dan Permendikbud Ristek No. 7 Tahun 2022 memuat standar isi materi kurikulum merdeka pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang juga menjadi acuan implementasi kurikulum merdeka (Kepmendikbudristekdikti, 2022). Maka dari itu, detail-detail yang termaktub di dalam dua Permendikbud Ristek tersebut sudah semestinya dipelajari dengan seksama oleh guru maupun stakeholder terkait.

Perubahan kurikulum pada Kementerian Pendidikan kemudian diikuti oleh Kementerian Agama dengan menerbitkan KMA No. 347 Tahun 2022 yang mengatur implementasi kurikulum merdeka pada lembaga pendidikan madrasah. Padahal Kementerian Agama belum lama mengeluarkan KMA No. 183 Tahun 2019 yang menggantikan KMA No. 165 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik yang menitikberatkan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama bagi peserta didik. Pada kasus-kasus tertentu implementasi kurikulum madrasah perspektif KMA No. 183 Tahun 2019 ini menyisakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, namun kini sudah harus berganti lagi ke kurikulum baru. Tak pelak, madrasah harus kembali mempersiapkan diri guna menyambut implementasi kurikulum merdeka secara bertahap.

Kebijakan implementasi kurikulum merdeka oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam hanya mengatur rumpun ilmu Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Komponen yang diatur dan menjadi tanggung jawab Ditjen Pendidikan Islam yakni Standar Isi (SI) dan Capaian Pembelajaran (CP) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab tersebut. Selebihnya, SI dan CP mata pelajaran umum mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Maka dari itu, pimpinan madrasah memiliki kewajiban ganda yaitu

memahami kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek serta kebijakan yang disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Implementasi kurikulum merdeka di madrasah sudah dimulai sejak tahun pelajaran 2022/2023 di sejumlah madrasah yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai madrasah percontohan (piloting) penerapan kurikulum merdeka. Pada tahun pertama ini dipilih sejumlah 2.571 madrasah dari jenjang RA, MI, MTs, dan MA/MAK yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai madrasah pelaksana kurikulum merdeka. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3811 Tahun 2022 tentang Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023.

Keberhasilan penerapan kurikulum merdeka pada madrasah, hendaknya diperhatikan beberapa komponen kurikulum yang harus dipahami dan dikuasai oleh guru madrasah. Dalam panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka yang dikeluarkan oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan Kesiswaan Madrasah, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh guru madrasah calon pengampu mata pelajaran, seperti memahami capaian pembelajaran (CP), merumuskan alur tujuan pembelajaran (ATP), melaksanakan proyek penguatan profil pelajar pancasila, serta asesmen pembelajaran.

Keputusan Mendikbud Ristek No. 262/M/2022 sebagai perubahan atas Keputusan Mendikbud Ristek No. 56/M/2022 memuat informasi mengenai pedoman kurikulum, struktur kurikulum, asesmen, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan Capaian Pembelajaran (CP) diatur dalam Keputusan Kepala BSKAP No. 008/H/KR/2022 Tahun 2022. Kemudian aspek dimensi, elemen, dan sub elemen profil pelajar pancasila tertuang dalam Keputusan Kepala BSKAP No. 009/H/KR/2022 Tahun 2022. Dengan demikian, tenaga pendidik di madrasah yang mengampu mata pelajaran umum harus terlebih dahulu membaca, memahami, dan menganalisis panduan yang disusun Kemendikbudristek. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berkewajiban membaca, memahami, dan menganalisis panduan yang diterapkan oleh Kementerian Agama.

### **Memahami Capaian Pembelajaran Kurikulum pada Madrasah**

Capaian Pembelajaran (CP) adalah sejumlah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir setiap fasenya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa untuk memudahkan dalam pencapaian pembelajaran, kurikulum merdeka dibagi ke dalam enam fase, yakni fase A untuk MI kelas III, fase B untuk MI kelas III-VI, fase C untuk MI kelas V-VI, fase D untuk MTs kelas VII-IX, fase E untuk MA/MAK kelas X, dan fase F untuk MA/MAK kelas XI-XII.

Setiap fase yang terdiri dari grade kelas ini berisi capaian pembelajaran (CP) yang harus dicapai oleh peserta didik saat mereka sampai pada tahap akhir fase. CP kurikulum merdeka ini ditulis dalam bentuk paragraf yang berisi perpaduan tiga kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga komponen ini saling terkait

satu sama lain. Di madrasah yang membedakan dengan sekolah adalah pembentukan karakter peserta didik melalui penguatan profil pelajar pancasila rahmatan lil ‘alamin yang memperkuat nilai-nilai moderasi beragama yang telah diinternalisasi dalam kurikulum sebelumnya melalui KMA No. 183 Tahun 2019.

Memahami CP bagi guru menjadi syarat mutlak bagi madrasah yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2023/2024. Temuan penelitian Siti Zulaiha dkk mendapat terdapat sebagian guru yang kesulitan dalam menganalisis CP, sehingga penerapan kurikulum merdeka menjadi kurang maksimal. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop kurikulum merdeka belajar.

### **Merumuskan Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Kurikulum Merdeka**

Tujuan pembelajaran (TP) dirumuskan setelah pendidik memahami capaian pembelajaran (CP). Dalam merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan berdasarkan elemen pada capaian pembelajaran dimana peserta didik harus memahami terlebih dahulu kompetensi dan lingkup materi yang termuat dalam elemen capaian pembelajaran. Menurut panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka yang disusun Kementerian Agama terdapat dua cara dalam menyusun tujuan pembelajaran. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dan dikaitkannya dengan konteksnya. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran serta dikaitkannya dengan konteksnya.

Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang bersifat umum bukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai setiap harinya. Tujuan pembelajaran ini dapat disusun berdasarkan tahapan-tahapan kemampuan kognitif peserta didik mulai dari yang paling rendah sampai tertinggi. Menurut Anderson dan Krathwohl, tahapan kemampuan kognitif tersebut dimulai dari tahap paling mudah, yakni mengingat sampai tahap paling tinggi yakni menciptakan. Secara berjenjang tahap tersebut mencakup: mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang masih bersifat umum tersebut dirumuskan ke dalam alur tujuan pembelajaran (ATP) yang dapat dilakukan dengan mengurutkan dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari yang umum ke yang khusus, dari hal yang mudah ke yang sulit, pengurutan secara hirarki, dan pengurutan prosedural. Contoh dalam menyusun ATP dari hal konkret ke abstrak misalnya dalam mata kuliah Fiqih guru mengajarkan peserta didik materi salat dengan terlebih dahulu mengamati praktik orang salat, kemudian mempraktikkannya secara nyata. Kemudian, pengurutan dari materi umum ke khusus, seperti pada mata pelajaran Akidah Akhlak materi tentang akhlak guru dapat menjelaskan konsep akhlak secara umum kemudian secara spesifik pada akhlak tertentu (Dendy Musthofa & Hasan Agus, 2022).

### **Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin**

Projek penguatan profil pelajar pancasila adalah kegiatan kokurikuler berbasis projek yang diatur oleh Keputusan Mendikbudristek No. 262/M/2022 yang bertujuan untuk memperkuat capaian kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dibuat mengacu pada standar kompetensi lulusan.<sup>28</sup> Profil pelajar Pancasila memiliki enam dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; mandiri; bergotong royong; bernalar kritis; dan kreatif. Projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) ini menggantikan internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam kurikulum sebelumnya (kurikulum 2013).

Di madrasah projek P5 ini ditambah dengan profil pelajar rahmatan lil alamin (P5 PPRA). Mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK Kementerian Agama, P5 PPRA adalah pembelajaran berbasis projek yang bertujuan menempa peserta didik agar memiliki pola pikir, bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal, serta menjunjung tinggi toleransi demi terwujudnya persatuan, kesatuan, dan perdamaian dunia.

PPRA ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Agama tahun 2020 hingga 2024. Dalam RPJMN tersebut secara eksplisit pemerintah menuangkan gagasan nilai-nilai moderasi beragama sebagai upaya guna meneguhkan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan multikultur. Melalui Kementerian Agama, nilai-nilai moderasi beragama lantang digaungkan dan dikampanyekan. Sehingga konsep nilai-nilai keagamaan yang moderat dapat memperkuat Indonesia sebagai bangsa yang multikultural dengan budaya, bahasa, kepercayaan, kemasyarakatan, atau keragaman politik-ideologis. Implementasi nilai-nilai moderasi beragama tersebut dilakukan di seluruh institusi pendidikan Kementerian Agama, termasuk menjadi muatan dalam kurikulum seluruh tingkatan madrasah.

Penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin merupakan projek pembelajaran yang menjadi implementasi nilai-nilai moderasi beragama di madrasah. Hal ini menjadi sangat urgen mengingat berdasarkan temuan penelitian (Rohman, 2018) ditemukan karakteristik eksklusif sebagian peserta didik di sekolah menengah. Meskipun temuan penelitian tersebut tidak ditemukan pada institusi madrasah, namun menjadi peringatan bersama bahwa nilai-nilai toleransi, moderasi, dan saling menghormati satu sama lain terancam tereduksi di kalangan remaja. Maka dari itu, pendidik di madrasah harus memahami betapa pentingnya penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang dalam hal ini dapat dikembangkan melalui projek P5 PPRA.

Projek P5 PPRA di madrasah harus menjadi strategi utama dalam pengarusutamaan nilai-nilai moderasi beragama. Sebab, kebutuhan akan narasi keagamaan moderat bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat secara umum tetapi juga menjadi kebutuhan personal dan kelembagaan yang dapat dimulai dari institusi



pendidikan Islam, seperti madrasah. Karakteristik yang harus dibangun oleh madrasah hendaknya sudah semestinya dimulai dari revitalisasi kurikulum yang ditopang dengan epistemologi rasional sebagai penalaran dasar (*basic reasoning*) dalam memahami teks agama dan menggali fenomena keberagaman sehingga terhindar dari sikap radikalisme dan fanatisme buta. Sehingga output peserta didik yang dihasilkan dapat memiliki karakteristik manusia muslim moderat yang saling menghargai dan memahami, belajar hidup dalam perbedaan, saling percaya dan mengedepankan pemikiran terbuka, apresiasi dan interdependensi, serta resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan.

Implementasi P5 PPRA ini menuntut karakter pendidik yang humanis-multikulturalis. Proyek-proyek penguatan P5 PPRA tersebut harus dipilih berdasarkan pertimbangan proyek tersebut mampu menumbuhkan sikap dan karakter humanis-multikulturalis peserta didik. Dalam hal ini madrasah dapat memilih tema-tema proyek sebagaimana panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Salah satu tema dalam panduan tersebut adalah “kita semua bersaudara”. Tema ini menjadi langkah yang tepat guna melaksanakan proyek P5 PPRA terkait keberagaman etnis, budaya, maupun agama di masyarakat Indonesia. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta untuk dapat menghargai sesama, mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan teman sabaya, mau berbagi dan bekerjasama, serta menghargai perbedaan. Sebagai contoh pada fase E dan F topik yang dapat dipilih adalah bakti sosial. Proyek tersebut dapat dilaksanakan di daerah multikultural dengan diversitas etnis, budaya, dan agama yang berbeda. Dengan demikian, proyek tersebut dapat memberikan pengalaman lebih kepada peserta didik dalam memahami perbedaan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian pustaka ini menyimpulkan bahwa kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah dilakukan saat kurikulum 2013 perspektif KMA No. 183 Tahun 2019 baru diterapkan, sehingga madrasah harus mempersiapkan diri menyambut kebijakan baru tersebut. Jika dianalisis, kebijakan implementasi kurikulum merdeka yang bertujuan untuk pemulihan pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik apabila pimpinan madrasah dan tenaga pendidik benar-benar telah siap dalam memahami kurikulum tersebut, baik dari segi pembelajaran intrakurikuler, maupun pembelajaran kokurikuler. Di madrasah sendiri kegiatan kokurikuler berupa proyek P5 PPRA yang sejalan dengan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang menjadi program prioritas Kementerian Agama dalam RPJM 2020-2024. Maka dari itu, pimpinan madrasah dan pendidik juga harus memahami nilai-nilai moderasi beragama yang disusun oleh Kementerian Agama. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi madrasah secara umum dan bagi tenaga pendidik secara khusus dalam mempersiapkan diri menyambut implementasi kurikulum merdeka.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, sebab hanya menganalisis kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah di bagian tertentu saja, seperti kesiapan madrasah menghadapi pergeseran dari kurikulum KMA No. 183 Tahun 2019 ke kurikulum KMA 347 Tahun 2022, analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta alur tujuan pembelajaran. Penerapan kebijakan tersebut baru berjalan satu tahun ajaran, yakni tahun ajaran 2022/2023. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian lanjutan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kurikulum merdeka di tahun pertama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Arisanti, K., & Yaqin, F. A. (2023). Adaptasi dan Inovasi Madrasah Ibtidaiyah Dalam Menyambut Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 386–393. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4583>
- Anas, Ibad, A. Z., Anam, N. K., & Hariwahyuni, F. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022). *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(1), 99–116.
- Asmuni, A. (2020). Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Paedagogy*, 7(4), 281. <https://doi.org/10.33394/jp.v7i4.2941>
- Baidhawiy, Z. (2007). Building Harmony And Peace Through Multiculturalist Theology-Based Religious Education: An Alternative for Contemporary Indonesia. *Combustion Science and Technology*, 21(5–6), 508–516. <https://doi.org/10.1080/00102208008946937>
- Churiyah, M., Sholikhan, S., Filianti, F., & Sakdiyyah, D. A. (2020). Indonesia Education Readiness Conducting Distance Learning in Covid-19 Pandemic Situation. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(6), 491. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i6.1833>
- Dendiy Musthofa, M., & Hasan Agus, A. R. (2022). The Implementation Of An Independent Curriculum InImproving The Quality Of Madrasah Education. *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled*, 17, 187–192.
- Direktorat KSKK, M. (2022). Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. In *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Fitriyah, C. Z., & Wardani, R. P. (2022). Paradigm of Independent Curriculum for Elementary Teacher School. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12, 236–243.

- Giatman, M., Siswati, S., & Basri, I. Y. (2020). Online Learning Quality Control in the Pandemic Covid-19 Era in Indonesia. *Journal of Nonformal Education*, 6(2), 168–175. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne>
- Kepmendikbudristekdikti. (2022). Pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. *Menpendikbudristek*, 1–112. [https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan\\_20220711\\_121315\\_Fix\\_Salinan\\_JDIH\\_Kepmen\\_Perubahan\\_56\\_Pemulihan\\_Pembelajaran.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220711_121315_Fix_Salinan_JDIH_Kepmen_Perubahan_56_Pemulihan_Pembelajaran.pdf)
- Nuwa, G. G. (2020). Kemerosotan Moral Siswa Pada Masa Pandemic Covid-19 : Meneropong Eksistensi Guru Pendidikan Agama Islam. *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.945>
- Prasetya, S. A., Asrohah, H., Najiyah, S. F., & Arif, S. (2021). Epistemic Rationality In Islamic Education: The Significance for Religious Moderation in Contemporary Indonesian Islam. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 22(2), 232–263. <https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.12771>
- Rohman, M. (2018). Tinjauan Filosofis Guru Pendidikan Agama Islam Humanis-Multikulturalis. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 151–174. <https://doi.org/10.21274/taalum.2018.6.1.151-174>
- Zulaiha, S., Meldina, T., & Meisin. (2023). Problematika Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka. *Journal on Education*, 6(1), 2056–2063. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3197>